



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KEMIRIPAN

No: 236/Un.14/IV/TV-CP/05/2023

Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari di bawah ini,

Nama Verifikator : Moh. Iqbal Assyauqi, M. Pd
Jabatan : Anggota Tim

telah melaksanakan uji kemiripan terhadap karya ilmiah yang berjudul “Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan (Penjajahan Belanda dan Jepang)”, karya:

Nama : Dr. H. Hamdan, M. Pd
NIP : 196604051993031005
Pangkat/Gol : IV a
Jabatan : Lektor Kepala

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan www.turnitin.com kemiripan karya di atas adalah 20 % (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 Mei 2023
Koordinator Tim,



Muhammad Iqbal, S. Th.I., MSI., Ph. D
NIP 197709062008011011



5219-16948-1-PB.pdf

by

Submission date: 13-Apr-2023 09:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 2063090223

File name: 5219-16948-1-PB.pdf (170K)

Word count: 3210

Character count: 21169

**SEKELUMIT
SEJARAH
PENDIDIKAN
ISLAM
DI INDONESIA**

Sahriansyah, dkk.

**IAIN Antasari Press
2013**

SAHRIANSYAH, DKK

**SEKELUMIT SEJARAH PENDIDIKAN
ISLAM DI INDONESIA**

IAIN Antasari Press

2013

**SEKELUMIT SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI
INDONESIA**

Penulis

Sahriansyah, Mila Hasanah, ZainapHartati, Asikin Nor,
Hamdan HM, Hasni Nor, Hilmi Mizani, Raihanah,
Siti Aisyah, Syaiful Bahri Djamarah, dan Tarwilah

Cover

Zainal F

Layout

Saridatun R

Penerbit

IAIN Antasari Press

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Banjarmasin,
telp (0511) 3256980

Cetakan I : September 2013

Pencetak

Aswaja Pressindo

vi + 250 halaman, 15.5 x 23 cm

ISBN: 978-979-3377-78-0

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ► ii

DAFTAR ISI ► iii

- BAB I** Pendidikan Islam Masa Kesultanan Banten ► 1
ZainapHartati
- BAB II** Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banjar ► 13
Mila Hasanah
- BAB III** Pendidikan di Bawah Organisasi Muhammadiyah
► 35
Sahriansyah
- BAB IV** Pendidikan Pesantren (Kebijakan dan Sistem
Pesantren) ► 51
Raihanah
- BAB V** Pendidikan Madrasah (Kebijakan dan Sistem
Madrasah di Indonesia) ► 77
HilmiMizani
- BAB VI** Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan
(Penjajahan Belanda dan Jepang) ► 95
H. Hamdan
- BAB VII** Pendidikan Islam di Masa Orde Lama (Sebuah
Refleksi Historis tentang Dinamika, Kebijakan, dan
Tokoh) ► 119
Syaiful Bahri Djamarah
- BAB VIII** Pendidikan Islam di Masa Orde Baru (1966-1998) ►
135
Tarwilah
-

- BAB IX** Pendidikan Islam di Masa Reformasi ► 157
Siti Aisyah
- BAB X** Pendidikan Islam Di bawah Organisasi al-Washliyah
dan Jami'atul Khair ► 205
Hasni Noor
- BAB XI** Pendidikan Sekolah (Kebijakan dan Sistem
Persekolahan) ► 229
Asikin Nor
- RIWAYAT PENULIS ► 248**

BAB VI

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN

(Penjajahan Belanda dan Jepang)

Oleh: H. Hamdan

A. Pendahuluan

Berbicara pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan, maka kita tidak akan lepas dari membicarakan tentang sejarah penjajahan itu sendiri dan kebijakan penjajah terhadap system pendidik yang dianut dan terhadap lembaga pendidikan Islam itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda selama kurang lebih 350 tahun, walaupun ini masih bisa diperdebatkan, kemudian penjajahan dilanjutkan oleh bangsa Jepang selama tiga setengah tahun. Dalam hal ini VOC Belanda yang sangat lama menjajah Indonesia telah mendirikan banyak lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah bahkan pendidikan kelautan, namun Belanda punya kebijakan tentang pendidikan, yang membedakan pendidikan untuk anak Belanda dan Indo-Belanda, pribumi dan keturunan Cina. Selain itu, Belanda mendirikan sekolah Desa yang diperuntukan untuk warga pribumi, tentu saja kurikulum tidak sama dengan sekolah yang diperuntukan untuk anak-anak Belanda.

Kebijakan lainnya adalah Belanda lebih perhatian kepada pendidikan Zending karena mereka punya misi kristenisasi di wilayah jajahannya. Sehingga berdampak pada lembaga pendidikan Islam bahkan Belanda tidak bersedia memberikan subsidi kepada lembaga yang dikelola oleh umat Islam.

Perjalanan lembaga pendidikan sangat panjang dan beragam, pendidikan dimulai dari Surau, Langgar, pesantren dan madrasah, tentunya ini semua atas kesungguhan dan keikhlasan tokoh agama dalam mendirikan lembaga pendidikan tersebut.

Sementara itu, pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan kebijakan Belanda, Jepang menghapuskan diskriminasi dalam

memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan Islam untuk berkembang.

Untuk lebih jelasnya permasalahan di atas, dapat kita ikuti dari pembahasan selanjutnya dari makalah yang amat dan sangat sederhana ini.

B. Pembahasan

1. Sejarah Kedatangan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*)

Berdasarkan fakta sejarah, pada awalnya bangsa Belanda datang ke Nusantara hanya untuk berdagang, akan tetapi kekayaan alam Nusantara yang sangat melimpah seperti rimpah-rimpah dan karet, maka tujuan utama hanya untuk berdagang tadi berganti untuk menguasai wilayah Nusantara sekaligus dengan mengembangkan fahamnya yang terkenal dengan semboyan 3 G yaitu: *Glory* (kemenangan/ kekuasaan), *Gold* (emas/kekayaan bangsa Indonesia) dan *Gospel* (upaya sublimasi terhadap umat Islam di Indonesia).¹

Karena VOC adalah perusahaan dagang, jadi wajar kalau organisasi ini bertujuan komersial dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kerajaan Belanda pada umumnya dan pemegang saham khususnya. Sehingga di mana-mana di Indonesia VOC berusaha memonopoli dalam setiap perdagangan rimpah dan komoditi lainnya pada daerah yang kaya rimpah-rimpah, karet dan sumber penghasilan alam lainnya.

Sehingga pada waktu VOC mula-mula datang di Inonesia, mereka langsung menuju ke daerah-daerah yang menjadi sumber kakayaan bagi pasaran dunia, yaitu kepulauan Maluku. Dua kesultanan yang berada di wilayah ini yaitu Ternate dan Tidore saling bermusuhan dan diperalat oleh orang portugis dan Spanyol. Baru pada permulaan abad ke 17 Raja Ternati menganggap VOC sebagai kawan dan memperbolehkan mendirikan benteng di pulau Ambon. Sejak

¹ H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam*, Pustaka Setia Bandung, 1998, h. 44, dalam Syamsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Kencana Media Group Jakarta, 2007, h. 291

tahun 1605 VOC meluaskan daerah pengaruhnya ke arah utara dari kedudukannya di Pulau Ambon sampai ke wilayah Sulawesi Utara dan Sangir Talaud.²

Dari pulau Ambon usaha VOC meluaskan lagi pengaruhnya ke pulau-pualu lain di Nusantara, sebagian besar catatan para sejarawan menyatakan bahwa pengaruh Belanda dalam menjajah Indonesia selama 350 tahun atau tiga setengah abad, namun sebagian para sejarawan terakhir bahwa Indonesia dijajah Belanda tidak selama 350 tahun melainkan satu atau satu setengah abad saja, yang 350 tahun tersebut termasuk Belanda berdagang di Nusantara dengan organisasi VOC-nya.

Hal ini terjadi setelah ambruknya VOC tahun 1816, pemerintah Belanda menggantikan kedudukan VOC dengan statuta Hindia Belanda tahun 1801 dengan terang-terangan menyatakan "bahwa tanah jajahan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada perdagangan dan kepada kekayaan negeri Belanda".³

Terlepas dari perbedaan sejarah di atas, yang jelas pengaruh Belanda (VOC) sangat warnai dan system pendidikan umum di Nusantara, termasuk pada lembaga pendidikan agama.

Terbukti system dan perundangan-undangan pendidikan warisan Belanda tetap dipakai oleh pemerintah di Indonesia sampai pada tahun 1989 dengan lahirnya UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional yang mengakui lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pondok Pesantren. Sebelumnya kedua lembaga pendidikan tersebut dianak-tirikan oleh pemerintah Indonesia, dan sampai sekarang sepertinya pengaruh tersebut masih dapat dirasakan perbedaan perlakuan antara lembaga pendidikan yang dikelola Kemendiknas dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kemenag.

²Sumarsono Mestoko dkk, Pendidikan di Indonesia dari jaman ke Jaman, Balai Pustaka Jakarta, 1986, h. 78-79.

³ M. Sukardjo & Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 122

2. Sejarah Pendidikan Pemerintah Belanda di Indonesia

Setelah orang-orang Portugis yang bercokol di wilayah Ambon dapat diusir oleh orang-orang Belanda dalam hal ini VOC, maka VOC berkuasa mutlak dan mulai mengatur perdagangan dan kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan VOC selain mengambil alih bekas lembaga-lembaga pendidikan Portugis juga mendirikan lembaga-lembaga baru. Pola kebijakan Portugis yang menguasai satu wilayah berusaha mengkristenkan penduduknya, maka VOC meneruskan pula "policy" tersebut. Bedanya orang Portugis menyebarkan agama Roma-Katholik, sedangkan orang Belanda agama Kristen-Protestan.⁴

Pada abad ke 17 dan 18 di negeri Belanda segala kegiatan menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan (pen. Gereja). Pemerintah tidak ikut campur tangan langsung dalam penyelenggaraannya, sehingga gereja punya kebebasan yang besar dalam pendidikan. Berbeda dengan di negeri Belanda, di Indonesia pada waktu VOC sama sekali tidak menghendaki lembaga keagamaan mempunyai wewenang besar dalam mengatur masyarakat di daerah-daerah yang mereka kuasai.⁵ Hal ini dapat dimaklumi, kenapa pihak Belanda (VOC) melakukan kebijakan demikian, supaya kurikulum pendidikan dapat dipantau dan diarahkan untuk kepentingan VOC sendiri.

Kegiatan pendidikan yang dilakukan VOC terutama dipusatkan di bagian timur Indonesia yang agama Katolik telah berakar, sementara di Batavia (pen. Sunda Kelapa/Jakarta Sekarang) sebagai pusat administrasi kolonial Belanda. Sekolah pertama didirikan di Ambon untuk anak-anak pribumi pada tahun 1607, karena saat itu belum ada anak-anak Belanda. Tujuan utamanya adalah menggantikan agama Katolik dengan penyebaran agama Protestan, Calvinisme. Sementara itu, di Jakarta sekolah pertama didirikan pada tahun 1630

⁴ Sumarsono Mestoko dkk, Pendidikan di Indonesia dari jaman..., h.79

⁵ Sumarsono Mestoko dkk, Pendidikan di Indonesia dari jaman..., h.77

untuk mendidik anak-anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang kompeten untuk kepentingan VOC.⁶ Berbeda dengan Sumarsono Mestoko dan kawan-kawan menyatakan bahwa: 'sekolah pertama yang didirikan di Jakarta (pen. Batavia) pada tahun 1617 menjelama menjadi sekolah "Betawi" (*Batavische school*) ..., dan pada tahun 1930 berdiri pula Sekolah warga Negara (*Burgerschool*).⁷

Dengan demikian apapun jenis dan jenjang pendidikan yang didirikan oleh Belanda, di mana tujuan pendidikan tidak terlepas dari kepentingan Belanda, baik dalam keuntungan material maupun keuntungan politik agar dapat melanggengkan kekuasaannya di Nusantara, sehingga tidak heran lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat Indonesia selalu diawasi, bila ternyata lembaga dan kurikulum pendidikannya dapat mengancam kepentingan VOC tidak jarang pihak Belanda membubarkan dan melarang kelangsungan lembaga pendidikan tersebut.

Jenis-jenis lembaga pendidikan Belanda pada abad ke 17 dan 18, yaitu:

a. Pendidikan Dasar

Lembaga pendidikan pada tingkat dasar adalah yang dinamakan sekolah Betawi atau *Batavische School* dimana peserta didiknya adalah pria dan wanita, dan Sekolah Negara yang diistilahkan dengan sebutan *Burgerschool*. Sekolah-sekolah tersebut bersifat pendidikan dasar dengan tujuan untuk mendidik budi pekerti. Tingkat kelas pada pendidikan dasar pada saat itu hanya sampai pada kelas 3.

b. Sekolah Latin

Pada abad ke 17 bahasa Latin merupakan bahasa Ilmiah bagi orang Eropa. Oleh karena itu timbul gagasan untuk mendirikan sekolah latin di Jakarta. Sistem persekolah dimulai dengan cara numpang tinggal ("in the kost") di rumah seorang pendeta. Pembiayaan

⁶ M. Sukardjo & Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep...*, h. 199

⁷ Sumarsono Mestoko dkk, *Pendidikan di Indonesia dari jaman...*, h.81

pendidikan ditanggung oleh pemerintah Belanda, setelah bertahaan sekitar sembilan tahun lembaga pendidikan jenis ini akhirnya tahun 1656 ditutup, kemudian dibuka kembali pada tahun 1666 tetapi hanya mampu bertahan empat tahun dan ditutup kembali.

c. *Seminarium Theologicum*

Dilihat dari tahun berdirinya lembaga pendidikan ini merupakan kelanjutan dari dari sekolah Latin yang berganti baju dengan nama pendidikan *Seminarium Theologicum* yang diperluas tujuan atau mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai ulama (pendeta) dan sebagai guru. *Seminarium* tersebut ciptaan Gubernur Jenderal van Imhoff yang didirikan pada tahun 1745 di Jakarta.

d. *Academie der Marine* (Akademi Pelayaran)

Van Imhoff juga mendirikan akademi pelayaran dengan maksud untuk melatih dan mendidik calon perwira pelayaran, lembaga ini didirikan pada tahun 1743 dan mengalami nasib yang sama dengan seminari ciptaan van Imhoff. Sebab oleh penggantinya Gubernur Jenderal Mossel akademi tersebut ditutup pada tahun 1755 dengan alasan lulusannya sangat sedikit sementara pendanaannya menjadi mahal.

e. Sekolah Cina

Pada awalnya VOC memberi kesempatan pendidikan hanya kepada bagi pegawai dan pribumi yang beragama Kristen. Sementara pribumi yang beragama Islam tidak dihiraukan oleh pemerintah kompeni karena sudah ada lembaga pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat. Tinggal penduduk keturunan Cina yang belum mendapat kesempatan memperoleh pendidikan. Akhirnya pada tahun 1737 didirikan sekolah untuk anak-anak Cina yang miskin.⁸

Jenis pendidikan di atas adalah pendidikan yang disediakan oleh VOC atau pemerintah Hindia Belanda pada abad 17 dan ke 18, sedangkan jenjang pendidikan pada akhir abad ke 18 sampai memasuki pertengahan abad ke 19 pemerintah Hindi Belanda

⁸ Sumarsono Mestoko dkk, Pendidikan di Indonesia dari jaman..., h. 80-82

menyelenggarakan pendidikan terutama bila dilihat dari peruntukan kesempatan memperoleh pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan bagi Warga Belanda, yaitu:

1) *Europese Lagere School* (ELS)

Sekolah Belanda atau *Europese Lagere School* (ELS) sejak semula dimaksudkan agar sama dengan sekolah yang ada di Nederland. Tujuan utamanya ialah mengembangkan dan memperkuat kesadaran nasional di kalangan keturunan Belanda, yang kebanyakan Indo Belanda, termasuk anak-anak yang lahir dari hubungan yang tak legal.

2) *Hogere Burgerschool* (HBS)

Murid-murid ELS dapat menempuh dua macam ujian, yakni ujian pegawai rendah (*klein Ambtenaars examen*) setelah masuk kelas 6 dan ujian masuk HBS, sekolah menengah setaraf dengan SMP dan SMA sekarang, setelah kelas 7. Biasanya anak-anak ELS sekitar 80% lulus untuk kedua macam ujian itu. Bagi anak lulusan ELS, memiliki ijazah *Klein Ambtenaars* (pegawai rendah) belum menjamin pekerjaan.

HBS merupakan jalan satu-satunya saat itu untuk dapat diterima di universitas-universitas di negeri Belanda. Mereka (orang-orang Indonesia) yang tidak dapat meneruskan pendidikannya, mereka dapat mengharapkan pekerjaan yang baik apabila memiliki ijazah HBS. Di sini Belanda dengan politik penjajahannya tetap membatasi orang Indonesia yang dapat belajar HBS, sehingga orang-orang Belanda yang memonopoli pekerjaan yang baik/tinggi.

3) *Meer Uitgebreid Lager Oudewijs* (MULO)

Tahun 1903 adalah tahun pendirian kursus MULO yang disambut baik oleh kaum Indo-Belanda dan mereka yang tidak sanggup menyekolahkan ke HBS yang dianggap mahal, MULO juga dianggap dapat memungkinkan

lulusannya bekerja di kantor pemereintah. Dan pada tahun 1914, kursus MULO diubah menjadi sekolah pertama yang tidak mengikuti pola pendidikan Belanda, namun tetap merupakan pendidikan yang berorientasi Barat yang tidak mencari penyesuaian dengan Indonesia. MULO merupakan lembaga pendidikan untuk semua.

b. Pendidikan bagi Warga Bumi Putera

Lembaga-lembaga pendidikan di atas, khusus ditujukan kepada anak-anak Belanda atau anak indo-Belanda, sementara anak-anak pribumi tidak banyak mendapat kesempatan bersekolah di sana, walaupun adanya statute 1818 yang menyatakan pemerintah hendaknya membuat peraturan yang diperlukan untuk sekolah-sekolah bagi anak bumi putera untuk mendapat pendidikan di sekolah Belanda". Sekolah menjadi harapan.

Lembaga-lembaga pendidikan untuk anak bumi putera

1) Sekolah Kelas Satu (SKS)

Kurikulum sekolah di kelas satu ini ditentukan sebagaimana peraturan tahun 1893 terdiri atas mata pelajaran membaca, dan menulis dalam bahasa daerah dan latin, membaca dan menulis dalam bahasa melayu; berhitung; ilmu bumi Indonesia; ilmu alam, sejarah pulau tempat tinggal; menggambar; dan mengukur tanah. Pada awalnya pemberian bahasa Belanda pada SKS ini sangat deskriminatif. Sekolah ini dianggap sebagai sekolah terminal yang tidak punya kesempatan meneruskan ke sekolah lanjutan. Lamanya pendidikan pada sekolah kelas satu selama 7 tahun.

2) Sekolah Kelas Dua (SKD)

Sekolah Kelas Dua merupakan pilah layanan pendidikan yang lain bagi masyarakat bumi puteri. SKD dimaksudkan sebagi sekolah rakyat yang memberi pendidikan yang sederhana bagi seluruh rakyat. SKD berlangsung selama 3

tahun. Bagi anak Pribumi hanya sebagian kecil yang dapat mengenyam pendidikan di lembaga SKD ini, hal ini dikarenakan kekurangan fasilitas dan ruang belajar, sehingga banyak anak yang tidak dapat terima.

3) Sekolah Desa (*Volkschool-Vervolgschool*)

Sekolah Desa sampai kelas 3, merupakan sekolah yang merakyat, banyak anak warga Bumi putera yang sempat mengecam pendidikan, kemudian dapat melanjutkanya ke kelas 4 dan kelas 5 sekolah rakyat.

4) *Holland Inlandse School* (HIS)

Alasan prinsip bagi pendirian HIS adalah keinginan yang kiat menguat di kalangan orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat.

Kondisi Sekolah Kelas Satu yang tidak memberikan kesempatan meneruskan pendidikan ke sekolah lanjutan, menyebabkan orang tua menuntut beragam hal yang menyebabkan tujuannya tercapai di mana lambat laun Sekolah Kelas Satu berubah menjadi HIS pada tahun 1914. Pada tahun tersebut sesuai dengan statute 1914 No. 764 menyatakan kurikulum HIS meliputi semua mata pelajaran ELS. Bahkan lebih kayak arena adanya pelajaran menulis bahasa Melayu dan bahasa Arab. Namun kurikulum yang ada senantiasa berorientasi pada Nederland.

5) *Algemene Middelbare School* (AMS)

Pendirian MULO sebagai lanjutan segala macam sekolah rendah yang berorientasi Barat, khususnya HIS merupakan langkah yang sangat penting dalam perkembangan suatu system pendidikan yang lengkap badi anak Indonesia, yaitu dibukanya AMS.

AMS merupakan sekolah lanjutan tingkat menengah yang terbagi beberapa bagian (jurusan), bagian A yang memutamakan Sastra dan Sejarah, dan bagian B yang memutamakan Matematika dan Fisika. Dengan demikian

terbuka jalan bagi anak-anak bumi Putera untuk mengecap pendidikan tinggi (universitas)

c. Pendidikan bagi Warga Cina

Sekolah untuk warga keturunan Cina disediakan oleh pemerintah Belanda dengan sebutan *Hollands Chinese School* (HCS), lahirnya sekolah ini bukan inisiatif pemerintah Belanda tetapi karena desakan dari pihak warga Cina yang menginginkan pendidikan yang merata dan lebih baik.⁹

3. Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Belanda

Tidak dapat dipungkiri bahwa penjajahan oleh bangsa asing di Indonesia selama beberapa abad terutama VOC Belanda dengan misi kristenisasi dan westernisasi, dengan berbagai penindasan yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia dengan berbagai kebijakan politik yang sangat merugikan bangsa Indonesia.

Menuru Zainuddin Zuhri yang dikutip oleh Maswrdi dalam buku Sejarah Pendidikan Islam menyatakan; “Dalam dada penjajah tersebut begitu kuat ajaran politikus curang yang licik *Machiavelli* yang berisikan:

- a. Agama sangat diperlukan bagi penjajah
- b. Agama dipakai untuk menjinakkan dan menaklukkan rakyat
- c. Setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan digunakan untuk memecah belah mereka dan mencari bantuan kepada pemerintah (dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda)
- d. Janji dengan rakyat tidak perlu ditepati jika merugikan (Belanda)
- e. Tujuan dapat menghalalkan segala cara.¹⁰

⁹ M. Sukardjo & Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep...*, h. 123-139

¹⁰ Maswardi, *Pola Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara pada Masa Awal sampai Sebelum Kemerdekaan*, (dalam *Sejarah Pendidikan Islam*: Editor; Samsul Nizar), Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h.306

Meskipun Belanda mendirikan lembaga pendidikan untuk warga pribumi tetapi semua itu adalah untuk kepentingan penjajah Belanda, terutama untuk mengisi tenaga kerja trampil yang murah dan pegawai rendah di kresedinan yang dibawah kekuasaan Belanda. Pendidikan agama Islam seperti pengajian kitab dan pondok pesantren dianggap tidak membawa kepada kepentingan pemerintah, bahkan ini dianggap sebagai ancaman oleh Belanda,

Karena itu pada masa colonial Belanda sekolah Zending masuk ke dalam system pendidikan umum gubernemen, secara teknis memasukkan sekolah Zending lebih mudah dari pada memasukkan pesantren kedalam system pendidikan umum.¹¹ Maka dengan mudah dapat dimaklumi bahwa pendidikan Zending terebut lebih banyak mendapat dukungan dari pemerintah colonial dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam seperti halnya pesantren.

Pada umumnya pendidikan Islam (pesantren) dibiayai oleh rakyat atau swadaya masyarakat, dan dengan demikian pendidikan umum akan dapat direalisasikan dengan biaya yang relative lebih murah, akan tetapi karena alasan politis, penggabungan system tersebut tidak terlaksana, sebagai akibat konsekwensi logis kebijakan pemerintah colonial Belanda tidak mau campur tangan dalam persoalan Islam.

Pada tahun 1888 Menteri colonial Belanda menolak memberikan subsidi (dana) kepada sekolah-sekolah Islam karena campur tangan Gubernur Jenderal yang tidak mau mengorbankan keuangan Negara untuk sekolah-sekolah tersebut (Islam),...pada saat itu usul untuk menggabungkan pendidikan Islam ditolak.¹² Hal ini pada umumnya lebih bersifat karena factor politik.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam semenjak itu mengambil jalan sendiri, lepas dari campur tangan pemerintah

¹¹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1974, h. 5

¹² Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah pendidikan....*, h. 7

Belanda, dan lebih berpegang pada tradisi sendiri namun terbuka untuk perubahan dalam tradisi tersebut. Sejak itu pendidikan Islam mulai mengembangkan satu model pendidikan sendiri yang berbeda dan terlepas dari system pendidikan Belanda.

Perjalanan sejarah lembaga pendidikan Islam sebagai berikut:

a. Surau/Langgar bertingkat

Surau dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia di Minangkabau, yang sebelumnya pendidikan Islam dilaksanakan di rumah-rumah ulama dalam bentuk pengajian Kitab atau belajar membaca al Qur'an.

Istilah Surau di Minangkabau sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Surau dalam system adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai pelengkap rumah gadang yang berfungsi sebagai tempat berkumpul, rapat, dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang telah akil balig dan orang tua yang uzur.¹³ Setelah kedatangan Islam fungsi surau menjadi tempat menimba ilmu-ilmu keagamaan selain sebagai tempat melaksanakan shalat. Sementara di Kalimantan Selatan atau pada masyarakat Banjar, surau dapat disamakan dengan langgar bertingkat, karena dari segi fungsinya ada kemiripan dengan surau di Minangkabau.

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan halaqah, materi atau kurikulum yang diajarkan pada awalnya masih di seputar belajar huruf hijaiyah, dan membaca al Qur'an, di samping ilmu keislaman lainnya, seperti: keimanan, akhlak dan ibadah. Pada umumnya pembelajaran dilaksanakan pada malam hari.¹⁴ Selain itu, surau juga digunakan sebagai lembaga pendidikan terikat, sebab masing-masing pengelolaan surau punya otoritasnya sendiri,

¹³ Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara*, (dalam Sejarah Pendidikan Islam: Editor; Samsul Nizar), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h.280

¹⁴ Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam...*, h. 381

baik dalam praktek tarekat maupun penekanan cabang ilmu-ilmu keislaman lainnya.

Pada mulanya surau memiliki peranan yang penting dalam transfer ilmu agama baik dalam hal belajar membaca al Qur'an maupun mempelajari ilmu-ilmu keislaman kepada para ulama atau syiekh, namun lambat laun eksistensi surau mengalami beberapa kemunduran bahkan akhirnya ditinggalkan, hal ini dikarenakan beberapa factor, antara lain:

- 1) Selama perang Padri banyak surau terbakar dan syiekh banyak yang meninggal.
- 2) Belanda memperkenalkan sekolah negeri (Sekolah Desa)
- 3) Kaum intelektual muda muslim mulai mendirikan Madrasah sebagai bentuk ketidak setujuan mereka terhadap praktek-praktek surau yang penuh dengan khurafat, bid'ah, dan takhayul.¹⁵

Sangat disayangkan surau kehilangan perannya pada masa selanjutnya, padahal dilihat dari konteks sejarah surau mempunyai peranan mampu menumbuhkan semangat nasionalisme dan dalam menentang kolonialisme dan imperialisme dari bangsa asing.

b. Meunasah

Meunasah merupakan tingkat pendidikan Islam rendah di Aceh. Meunasah dikatakan berasal dari bahasa Arab Madrasah ini ada kemungkinan lidah orang Aceh menyebut madrasah menjadi madrasah, ini sama halnya sebagian orang Banjar menyebut madrasah /dengan mandarsah. Meunasah merupakan satu bangunan seperti rumah tetapi tidak punya jendela dan bagian-bagian lain. Bangunan ini digunakan sebagai tempat belajar, berdiskusi dan membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan, ia juga sebagai tempat bermalam para anak-anak muda yang tidak mempunyai isteri.¹⁶

¹⁵ Abasri, Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam..., h. 383

¹⁶ Abasri, Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam..., h. 384

Meunasah secara fisik, adalah bangunan rumah panggung yang dibuat pada setiap kampung, setiap kampung terdiri dari 40 rumah dan diketuai oleh kucik. Dalam meunasah terdapat sumur, bak air, dan WC yang berjarak dengan meunasah. Biasanya meunasah terletak di pinggir jalan. Adapun fungsi meunasah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat dan tempat penyalurannya, tempat penyelesaian perkara agama, musyawarah dan tempat menerima tamu.
- 2) Sebagai lembaga pendidikan Islam di mana diajarkan pelajaran membaca al Qur'an. Pengajian untuk orang dewasa diadakan pada malam hari tertentu dengan metode ceramah dalam satu bulan sekali. Kemudian, pada hari jum'at dipakai ibu-ibu untuk shalat berjamaah zhuhur yang diteruskan dengan pengajian yang dipimpin seorang guru perempuan.¹⁷

Meunasah dipimpin oleh teungku. Teungku bermakna pembina agama, bertugas sebagai imam shalat, dan menjadi panutan bagi masyarakat Aceh. Tuengku mengajari anak-anak membaca a-Qur'an, mengajar orang dewasa shalat, menjadi imam, mengurus masalah sosial di wilayah meunasah yang dipimpinnya, seperti mengurus jenazah, perkawinan, kegiatan Ramadhan, dan hari Raya.

Belajar di Meunasah tidak dipungut bayaran alias gratis, para teungku tidak diberi gaji, karena mengajar dianggap ibadah. Namun biasanya teungku mendapat hadiah dari murid-muridnya apabila mereka telah belajar al Qur'an sampai juz ke-15 atau pada saat khatam al Qur'an. Hadiah-hadiah lain seperti pada saat upacara pernikahan, sunat rasul, pembagian harta warisan dan juga dari zakat¹⁸.

¹⁷ Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo, 2001, h. 42

¹⁸ Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam...*, h. 385

Eksistensi meunasah sebagai lembaga pendidikan agama tingkat rendah sangat mempunyai arti bagi masyarakat Aceh. Semua orang tua memasukkan anaknya ke lembaga ini. Dengan kata lain, meunasah merupakan sekolah agama wajib belajar bagi masyarakat Aceh waktu itu. Lembaga pendidikan setelah meunasah ada lagi Rangkang lembaga pendidikan setingkat SMP atau MTs dan Dayah setingkat SMA atau Aliyah.

c. Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam, tempat para santri belajar agama Islam dengan menerapkan moralitas Islam (akhlak) sebagai pedoman. Pesantren untuk menanamkan pemahaman ilmu dan pengahayatan serta pengamalan ajaran Islam (*tafaqquh fi ad-din*). Umumnya pesantren berbentuk asrama di bawah pimpinan kiai, yang dibantu ulama. Di pesantren tinggal pula ustazd bersama santri.¹⁹

Berdasarkan sejarah, pondok pesantren resmi dikenal sebagai lembaga pendidikan islam pada awal abad ke 19 (tahun 1800), namun dalam naskah Serat Centhini, sebuah sumber sejarah tradisional, disebut bahwa cikal bakal pesantren terdapat di Karang Banten, Pesantren Karang ini berdiri sekitar tahun 1520an²⁰

Namun meskipun demikian, belum dapat dipastikan kapan pesantren pertama di Indonesia. Tercatat sebuah pesantren tua yakni “pesantren” Tegalsari yang didirikan pada tahun 1742. Hal ini berdasarkan survey Belanda pertama (1819) mengenai pendidikan pribumi mengisyaratkan bahwa pesantren dalam arti sebenarnya belum ada di seluruh Jawa. Lembaga pendidikan yang mirip dengan pesantren dilaporkan terdapat di

¹⁹ Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, Jakarta: Ichtiar baru van Hoeva, jilid 5, 2002, h.17

²⁰ Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk..., h.17*

Priangan, Pakalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Mediun dan Ponorogo. Selanjutnya menurut survey ini juga, pesantren Tagalsari di Madiun-Ponorogo merupakan pesantren yang terbaik pada waktu.²¹

Dari hasil survey Belanda tersebut bahwa pesantren Tegalsari sudah berdiri jauh sebelum dilakukan survey tersebut, terbukti pesantren Tegalsari sudah memenuhi fasilitas sebagai lembaga pendidikan yang dinilai oleh Belanda sebagai sekolah yang terbaik pada saat itu.

Terlepas dari kapan pesantren pertama berdiri di Indonesia, yang jelas kehadiran pesantren tidak dapat dipisahkan dari tuntutan umat, karena itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya, sehingga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Hal yang juga segala aktivitasnya pun mendapat dukungan dan apresiasi penuh dari masyarakat sekitarnya.

Dari Perspektif kependidikan, pesantren merupakan satu-satunya lembaga kependidikan yang tahan terhadap berbagai gelombang modernisasi. Dengan kondisi demikian itu, kata Azyumardi Azra (dalam Abasri), menyebabkan pesantren tetap *survive* sampai hari ini. Sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan Islam diberbagai Dunia Islam, tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren yang mampu bertahan. Kebanyakannya lenyap setelah tergusur oleh ekspansi system pendidikan umum atau sekuler. Nilai-nilai progresif dan inovatif diadopsi.²²

Materi pelajaran dan metode pelajaran

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren pada dasarnya hanya mengajarkan agama, sedangkan kajian mata

²¹ Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk...*, h.18

²² Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam...*, h. 386

pelajarannya ialah kitab-kitab dalam bahasa Arab (kitab kuning). Pelajaran agama yang dikaji pesantren ialah Al-Qur'an dengan tajwid dan tafsirnya, aqa'id dan ilmu kalam, fikih dan ushul fikih, hadis dengan muhtalah hadis, bahasa Arab dengan ilmunya, tarikh, mantiq, dan tasawuf.

Adapun metode yang lazim digunakan dalam pendidikan pesantren ialah;

- 1) *Wetonan*, yakni suatu metode kuliah dimana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk disekeliling kiai yang menerangkan pelajaran. Santri menyimak kitab masing-masing dan mencatat jika perlu. Pelajaran diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum atau sesudah melaksanakan shalat fardu. Di Jawa Barat, metode ini disebut dengan *bandongan*, sedangkan di Sumatera disebut dengan halaqah.
- 2) *Metode Sorogan*, yakni suatu metode dimana santri menghadap kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Metode Sorogan ini merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan metode pendidikan Islam tradisional, sebab system ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi santri/kendatipun demikian, metode ini diakui paling intensif, karena dilakukan seorang demi seorang dan ada kesempatan untuk Tanya jawab langsung.
- 3) *Metode hafalan*, yakni suatu metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya.²³

Baik materi maupun metode pembelajaran yang digunakan di pesantren tentu sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan dan dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, pondok pesantren mempunyai beberapa cirri

²³ Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga...*, 105-106

yang menonjol terutama dalam kondisi kehidupan pesantren, sehingga membedakan dengan system pendidikan lainnya.

Menurut Zamakhsyari Dhofeir (dalam Abasri) mengemukakan ciri-ciri tersebut, sebagai berikut:

- 1) Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiayinya.
- 2) Adanya kepatuhan santri kepada kiayi
- 3) Hidup hemat dan penuh kesederhanaan
- 4) Adanya kemandirian
- 5) Mempunyai jiwa tolong-menolong dan suasana persaudaraan
- 6) Kedisiplinan
- 7) Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan, dan
- 8) Pemberian Ijazah.²⁴

Tentunya ciri-ciri pondok pesantren yang dikemukakan Zamakhsyari Dhofier di atas merupakan gambaran sosok pesantren yang masih murni yaitu pesantren tradisional yang masih melestarikan budaya pondok yang masih asli. Karenanya tidak menutup kemungkinan pondok pesantren sekarang akan ada perubahan sesuai dengan dinamika dan kemajuan pesantren.

Pada awal abad ke 20 pendidikan di Indonesia menjadi dua golongan, yaitu: pertama adalah pendidikan yang diberikan oleh sekolah Barat yang sekuler yang tidak mengenal ajaran agama, dan yang kedua adalah pendidikan yang diberikan pondok pesantren yang hanya mengenal ilmu agama saja.

Pendidikan Kolonial Belanda sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional, bukan saja dari segi metode, tetapi lebih khusus dari segi isi dan tujuannya. Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah colonial Belanda khususnya berpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi sedangkan lembaga pendidikan Islam lebih mengutamakan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi pengahayatan agama.²⁵

²⁴ Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam...*, h. 389

²⁵ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah pendidikan...*, h. 24

Dengan merebaknya sekolah-sekolah Desa yang didirikan Belanda, sementara pondok pesantren terbatas jumlah dan tidak dapat menjangkau semua wilayah dan semua anak usia sekolah khususnya warga pribumi yang mayoritas beragama Islam. Dalam hal ini muncul kesadaran dari ulama-ulama dan orang-orang berada dikalangan umat Islam pada waktu, selain itu pondok pesantren tidak mampu menyaingi sekolah-sekolah Belanda, maka dirasakan pentingnya member pendidikan yang teratur dan regular di sekolah yang dinamakan madrasah.

d. Madrasah

Salah satu bentuk pendidikan Islam adalah madrasah. Madrasah mulai dikenal pada abad ke 11, semula madrasah adalah lembaga pendidikan orang dewasa, sebagai kelanjutan dari Kutta yang setingkat dibawahnya. Madrasah dalam bentuk sekarang pertama kali didirikan oleh Nizam al-Mulk (1018-1092) ns di Baghdad pada tahun 1067 dengan nama Madrasah Nizamiyah.²⁶

Sementara itu, di Indonesia perkembangan pendidikan Islam dalam bentuk madrasah merupakan pengembangan system pendidikan tradisional yang diadakan di surau, langgar, masjid dan pesantren. Perkembangan selanjutnya mengubah system halaakah ke system klasikal dipengaruhi oleh system dan sekolah pemerintah Hindia Belanda.

Berdasarkan sejarah lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah, madrasah yang tertua adalah Madrasah Mamba'al Ulum (1905), kemudian Madrasah Nahdatul Watan, Madrasah Hizbul Wathan, dan Madrasah Tasywirul Afkar, Sekolah Diniyah (1915) Madrasah Sumatera Thawalib (1916), dan madrasah diniyah Puteri (1923).²⁷

²⁶ Ade Armando, Enseklopedi Islam untuk Pelajar, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002, h.3

²⁷ Ade Armando, Enseklopedi Islam untuk Pelajar, Jilid 4,....,h.3

Berdirinya madrasah-madrasah di Indonesia dimulai adanya kesadaran dari ulama dan intelektual Islam untuk memajukan pendidikan bagi umat Islam, karena pendidikan Belanda lebih maju, namun menurut anggapan ulama Islam bahwa pendidikan yang di berada di bawah pemerintah Hindia Belanda adalah pendidikan yang hanya berorientasi pada keduniaan dan sekuler. Sehingga mereka mendirikan lembaga pendidikan baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang dinamakan madrasah atau sekolah diniyah.

Madrasah-madrasah tersebut antara lain:

- 1) Madrasah (Adabiyah School), madrasah ini didirikan oleh Syikh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang. Belum cukup satu tahun madrasah ini gagal berkembang dan dipindahkan ke Padang. Pada Tahun 1915 madrasah ini mendapat pengakuan dari Belanda dan berubah menjadi *Holland Inlandsche School* (HIS).
- 2) Sekolah Agama (Madras School) didirikan oleh Syikh M. Thaib Umar di Sengayang Batusangkar pada tahun 1910. Madrasah ini pada tahun 1913 terpaksa ditutup dengan alasan kekurangan tempat. Namun pada tahun 1918, Mahmud Yunus mendirikan Diniyah School sebagai kelanjutan dari Madras School.
- 3) Madrasah Diniyah (Diniyah school). Madrasah ini didirikan pada tanggal 10 Oktober 1915 oleh Zainuddin Labai El Yunusiy di Pandang Panjang.
- 4) Madrasah Salafiyah. Madrasah ini didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari pada Tahun 1916 di Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur. Madrasah ini berada di bawah naungan organisasi Nahdatul Ulama (NU)
- 5) Madrasah Muhammadiyah, madrasah ini tidak diketahui tahun berdirinya, tapi diperkirakan berdiri pada tahun 1918 oleh organisasi Muhammadiyah.
- 6) Arabiyah School. Madrasah ini didirikan pada tahun 1918 di lading Lawa oleh syekh Abbas. Kemudian dilanjutkan dengan:

- 7) Sumatera Thawalib didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah pada tahun 1921 di Padang Panjang, Bukit tinggi, Sungayang, Batusangkar, dan Maninjau.
- 8) Madrasah Diniyah Puteri (1923).²⁸

Madrasah-madrasah di atas merupakan pionir dalam pendirian madrasah-madrasah lainnya di berbagai daerah di Nusantara ini. Keberadaan madrasah pada saat itu mampu memberikan yang terbaik bagi warga pribumi dalam mengecap pendidikan dasar yang seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan agama secara klasikal.

4. Sejarah Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang

Sistem persekolahan di jaman pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan karena system penggolongan baik menurut golongan bangsa, maupun status social dihapus. Dengan demikian terdapat integrasi terhadap macam-macam sekolah yang sejenis. Sejak jaman Jepang bahasa dan istilah-istilah mulai dipergunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Sekolah Dasar, waktu itu dipergunakan istilah Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko), terbuka untuk semua penduduk. Lama pendidikannya enam tahun.²⁹

Hal ini sangat berbeda dengan kebijakaan Pemerintah Belanda yang membagi sekolah ke dalam beberapa kelompok, yaitu sekolah untuk anak Belanda, priyayi, warga bumi putra, dan warga Cina.

Sebagai kelanjutannya adaalah sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko) dan selanjutnya Sekolah Menengah Tinggi (setingkat SMA) dinamakan dengan istilah Koto Chu Gakko. Lama pendidikannya adalah 3tiga tahun untuk SMP dan tiga tahun untuk SMT/SMA.

²⁸ Maswardi, *Pola Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara ...*, h. 292-293

²⁹ Sumarsono Mestoko dkk, *Pendidikan di Indonesia dari jaman...*, h.138

Setelah Belanda angkat kaki di wilayah Nusantara, maka dilanjutkan dengan penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia hanya kurang lebih tiga setengah tahun, pada saat itu Jepang ingin mengambil hati rakyat dengan menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa di Indonesia, niat baik tersebut dibuktikan dengan dibentuknya PPKI dan BPUPKI. Dalam kebijakan pemerintah Jepang terhadap lembaga pendidikan Islam tidak begitu ketat seperti halnya pada pemerintahan Belanda. Jepang memberikan toleransi yang banyak terhadap pendidikan Islam di Indonesia, kesetaraan pendidikan penduduk pribumi, sama dengan penduduk atau anak-anak penguasa. Bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu bela diri kepada pemuda Indonesia.

Selain itu. Pendidikan Jepang juga memberikan keleluasaan bagi warga untuk mendirikan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, dan anak-anak dibolehkan untuk belajar agama dan mengaji.³⁰

Dari uraian di atas dapat dimaklumi, kenapa Jepang berusaha ingin mendapatkan simpatik bangsa Indonesia, karena Jepang mempunyai maksud tertentu supaya mendapat bantuan dalam perang Asia Pasifik melawan Sekutu.

C. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil paparan pada uraian terdahulu, maka pada bagian penutup dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut:

- a. Kedatangan VOC ke Nusantara pada awalnya hanya untuk berdagang, namun karena kekayaan sumber alam Indonesia niat semula hanya untuk berdagang berubah ingin menguasai/memonopoli dan akhirnya menjajah.
- b. Pola pendidikan Belanda membedakan antara pendidikan untuk anak-anak Belanda, Pegawai Tinggi, warga pribumi,

³⁰ Maswardi, *Pola Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara ...*, h.314

daan warga Cina. Tidak semua warga pribumi dapat mengenyam pendidikan menengah apalagi pendidikan tinggi.

- c. Pemerintah Hindia Belanda lebih konsern terhadap misi Zending/Kristenisasi dan tidak bersedia memberikan subsidi kepada lembaga pendidikan Islam.
- d. Lembaga pendidikan Islam berkembang mulai dari Surau, langgar, Masjid, Meunasah, Pesantren dan madrasah.
- e. Madrasah lahir karena tidak semua warga bumi putera dapat bersekolah pendidikan rendah. selain itu, untuk menyangi lembaga pendidikan Belanda yang hanya berorientasi pada keduniaan dan sekuler.
- f. Pada masa pendudukan Jepang, dihapusnya diskriminatif dalam memperoleh pendidikan, dan diberikan keleluasaan bagi umat islam untuk mendirikan lembaga pendidikan dan tempat ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abasri, *Sejarah dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara*, (dalam Sejarah Pendidikan Islam: Editor; Samsul Nizar), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo, 2001
- Ade Armando, dkk, *Enseklopedi Islam untuk Pelajar*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002
- Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeva, 2002

- H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, dalam Syamsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Kencana Media Group Jakarta, 2007.
- Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1974.
- Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- M. Sukardjo & Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Mahmud Arief, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2008.
- Maswardi, *Pola Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara pada Masa Awal sampai Sebelum Kemerdekaan*, (dalam *Sejarah Pendidikan Islam*: Editor; Samsul Nizar), Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Sumarsono Mestoko dkk, *Pendidikan di Indonesia dari jaman ke Jaman*, Balai Pustaka Jakarta, 1986.

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

9%
★ **media.neliti.com**
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%